RINGKASAN

Konrada Aurelita Putri Stefani Wonga. Prosedur Penyusunan Piutang Daerah Berdasarkan Pengelompokkan Piutang Daerah Penyisihan Piutang Daerah Dan Temuan BPK Di Kanwil DJPb Jawa Tengah. Dosen Pembimbing Endro Sugiarto, S.E., M.M.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit eselon II yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan. Nomenklatur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara resmi digunakan sejak tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Susunan Organisasi Departemen Keuangan. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, serta kegiatan monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, dan verifikasi di bidang perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah didukung oleh beberapa bidang, yaitu Bidang Umum, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, serta Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal. Laporan magang ini membahas prosedur penyusunan piutang daerah berdasarkan pengelompokan piutang daerah, penyisihan piutang daerah, dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan (ASPLK).

Prosedur penyusunan piutang daerah diawali dengan pengumpulan data piutang dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut diidentifikasi dan dikelompokkan berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai dasar perhitungan penyisihan piutang daerah menggunakan data bantu. Selain itu, dilakukan pengumpulan dan identifikasi temuan BPK yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyajian

piutang daerah yang direkapitulasi secara sistematis untuk mendukung analisis. Seluruh prosedur disusun dalam bentuk alur kerja dan flowchart guna menyeragamkan pemahaman serta menghasilkan data piutang yang terstruktur, konsisten, dan akuntabel sebagai acuan penyusunan LKPK dan laporan analisis tematik di Kanwil DJPb Jawa Tengah.